

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap paradigma pendidikan terkait erat dengan landasan filosofisnya. Pendidikan sebagai pengetahuan, dalam penerapannya, adalah bentuk ranting dari filsafat. Ada banyak aliran filsafat khususnya pendidikan, yang mana masing-masing merekonstruksi paradigma pendidikan yang lain. Menjauhkan diri dari aliran pemikiran yang telah ada berarti menghasilkan pembentukan paradigma baru. Maksud paradigma dalam konteks kajian ini adalah dalam pandangan filosofis untuk melihat problem pendidikan. Ada banyak aliran dalam filsafat modern, termasuk progresivisme, esensialisme, perenialisme, eksistensialisme, dan rekonstruksionisme. Di Indonesia, pendidikan didirikan atas pemahaman sosiologis yang bersumber dari konvensi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan yang diterapkan dinegeri ini seharusnya bukan hanya memperhatikan kualitas yang bersifat individu, tetapi juga kualitas dalam tatanan struktur masyarakat atau dalam arti lain adalah berguna bagi orang lain.

Menurut peraturan di Indonesia dalam Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1-3:

“(1) Pendidikan adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran dimana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri, masyarakat, bangsa, dan negara. (2) Pendidikan nasional adalah pendidikan yang didasarkan

pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia, serta dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah. (3) Sistem pendidikan nasional meliputi seluruh komponen pendidikan yang bersinergi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.”¹

Pendidikan dikatakan usaha yang disengaja dan terencana, artinya seseorang yang menempuh suatu pendidikan adalah orang yang sengaja melakukan hal tersebut, tanpa adanya suatu ancaman atau tekanan dari orang lain. Adapun jika ada maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang tidak sedang melakukan pendidikan, meskipun secara fisik ikut serta dalam proses pendidikan.

Menurut Darmaningtyas, yang dinamakan pendidikan yakni upaya yang dilakukan pendidik yaitu orang yang sedang menempuh pendidikan dengan tujuan mempersiapkan kehidupan dimasa yang akan datang sebagai manusia yang berkembang dengan matang secara moral melalui bimbingan, pengajaran, pelatihan, dan pembiasaan.² Dengan demikian, Samba menunjukkan bahwa pendidikan adalah manifestasi sejati dari kehidupan, dimana proses pendidikan tersebut seutuhnya menjadikan manusia yang siap dengan tujuan menghasilkan turunan yang berkualitas, mampu dalam artian mandiri, mampu mempelajari serta memecahkan masalah kehidupan, memiliki kreativitas, kebajikan, keterampilan unggul, dan keinginan kuat untuk memajukan dan memberdayakan masyarakat.³ Pendidikan mencakup semua pengalaman pendidikan yang terjadi di semua pengaturan dan

¹ Peraturan Pemerintah RI, “*Pasal 1 Ayat 2 & 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003*” (2003).

² Darmaningtyas, *Pendidikan Yang Memiskinkan* (Yogyakarta: Galangpress, 2004) 15.

³ S. Samba, *Lebih Baik Tidak Sekolah* (Yogyakarta: LKIS, 2007) 22.

sepanjang hidup serta memiliki efek pada perkembangan individu. Pendidikan merupakan sarana yang dilalui manusia mencapai kedewasaan, baik perkembangan mental maupun psikisnya.⁴ Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Proses pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuannya dalam ranah nasional, yaitu *pertama* menumbuhkembangkan kompetensi, membentuk *character* dan peradaban yang bermartabat, sebagaimana dalam pembukaan UUD 45' mencerdaskan kehidupan bangsa, *kedua* memaksimalkan potensi religiusitas siswa, untuk menjadi individu yang beriman dan bertakwa, beradab, berilmu, cakap, kreatif, dan berbudi luhur. Untuk mencapai semua tujuan ini tidak akan sederhana, diperlukan perancangan dan metode yang cermat untuk proses pembelajaran melalui lembaga pendidikan agar menghasilkan *output* yang maksimal, sebagaimana ditentukan dalam UU Sisdiknas.⁵

Sebagai usaha yang terencana, pendidikan tentu memerlukan seperangkat alat atau instrumen, baik persiapan sampai pelaksanaannya yang matang untuk menyelenggarakan proses pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kumpulan instrumen tersebut atau yang kerap disebut sebagai "kurikulum" yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum adalah sebuah sistem

⁴ R. Mudiaharjo, *Pengantar Pendidikan; Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Pada Umumnya Dan Pendidikan Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001) 43.

⁵ Peraturan Pemerintah RI, "Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3" (2003).

atau kumpulan pengaturan untuk tujuan, isi, dan sumber belajar, serta teknik yang digunakan untuk memandu pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Kurikulum pendidikan di Indonesia selalu berkembang dan berubah mengikuti perubahan. Modifikasi yang paling kita sadari antara lain pergeseran kurikulum 1994 ke kurikulum KBK 2004, perubahan selanjutnya ke kurikulum KTSP 2006, dan perubahan terbaru ke kurikulum 2013. Perubahan kurikulum terutama disebabkan oleh pesatnya perkembangan zaman, sehingga kurikulum tradisional yang terus beroperasi dalam kerangka masa lalu diyakini tidak mampu menjawab kesulitan kontemporer dan menemukan jawaban atas isu-isu kontemporer. Pergeseran kurikulum tersebut lebih terarah, sehingga proses pembelajaran di zaman ini dapat menawarkan jawaban yang tepat atas berbagai persoalan yang muncul di masyarakat. Begitu pula ketika kurikulum KTSP 2006 diubah menjadi kurikulum 2013, prosesnya melibatkan banyak perdebatan yang berlangsung cukup lama hingga menghasilkan konsensus bahwa kurikulum baru harus dikembangkan. Salah satu penyebab berkembangnya konsep perubahan adalah KTSP dipandang kurang menitikberatkan pada akhlak siswa sehingga mengakibatkan turunnya moral remaja.⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, Mulyasa menyatakan bahwa penurunan akhlak, budi pekerti anak bangsa merupakan unsur utama dalam perubahan kurikuler. Dia mengatakan bahwa hampir setiap hari, kita dihadapkan pada contoh perilaku agresif yang mengerikan, kriminalitas, perzinahan, kecanduan narkoba, dan korupsi parah

⁶ Saiful Anwar, "Internalisasi Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surat Al-Hujurat Tafsir Fi Zilalil Qur'an," *JIE: Journal of Islamic Education* 6, no. 1 (2021): 1–12.

melalui film dan televisi.⁷ Kejadian ini menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan dan landasan moral dan spiritual yang menjadi dasar kehidupan manusia.

Banyak kalangan praktisi dan pakar didunia pendidikan telah mulai mengkaji perjalanan panjang pendidikan, intinya adalah dalam proses pendidikan perlu ditanamkan pendidikan adab disamping pendidikan kecerdasan atau keilmuan, sehingga pendidikan tidak hanya menghasilkan manusia-manusia yang cerdas an berilmu namun juga tercipta manusia yang beradab.⁸ Dunia pendidikan membutuhkan sistem pendidikan yang mampu menciptakan individu yang cerdas, berpengharapan, dan berwawasan, serta memiliki landasan moral dan spiritual yang sehat khususnya sistem pendidikan Indonesia. Maka dari itu, setelah melalui perjalanan panjang, kurikulum 2013 diperkenalkan, dengan menekankan unsur moralitas sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki siswa.

Indonesia, dalam dunia pendidikan pada dasarnya telah memiliki sebuah sistem pendidikan dengan unsur moralitas dan spiritualitas yang sudah mendarah daging.⁹ Sistem pendidikan berbasis asrama atau lebih dikenal pondok pesantren telah diakui secara luas merupakan ciri khas pendidikan ke-Indonesiaan. Keberadaan pondok pesantren ini sengaja atau tidak, sistem pendidikan pesantren seringkali diabaikan dikalangan pemerintah sendiri.

⁷ E. Mulyasa, *Pengembangan Dan Implementasi Kurikulum 2013* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 11.

⁸ Saiful Anwar, *Pendidikan Karakter: Kajian Perspektif Tafsir Fi Zilalil Qur'an* (Tulungagung: STAI Muhammadiyah Tulungagung, 2021) 23.

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES, 1994) 25.

Namun, ini tidak berarti bahwa kualitas sekolah di pesantren memburuk. Sebaliknya, pesantren terus mengungguli sistem-sistem pendidikan yang lain dalam menghasilkan generasi-generasi bangsa yang unggul. Individu yang menempuh pendidikan di pondok pesantren memiliki tingkat keilmuan yang tinggi dan kemampuan untuk menjaga standar moral sesuai dengan ajaran agama. Terdapat anggapan di pondok pesantren bahwa 'ilmu tanpa amal tidak ada artinya'. Ini menyiratkan bahwa individu yang memiliki kecerdasan akademik namun tidak bermoral dapat dikatakan tidak maksimal hasil pendidikan yang ditempuhnya, atau bisa dikatakan tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kecerdasan yang dimilikinya tidak diimbangi dengan perilaku yang baik karena tidak dapat mengambil manfaat dari pengetahuannya. Alih-alih memberikan keuntungan, kehadirannya justru menjadi sumber guncangan bagi masyarakat luas. Dalam perkembangannya, sistem pendidikan pesantren kembali menarik perhatian pemerintah sepanjang pertumbuhannya. Hal ini semata-mata karena pesantren secara konsisten melahirkan generasi calon penerus yang dapat diandalkan. Saat ini sistem pendidikan di pondok pesantren semakin variatif, bukan hanya pendidikan agama dan karakter namun sudah berkembang ke pendidikan umum, termasuk dalam metode pembelajaran yang digunakan telah berkembang mengikuti arus perkembangan zaman.

Muhaimin mengacu pada pendidikan pesantren sebagai bentuk pendidikan yang terintegrasi, Muhaimin membaginya menjadi dua kategori:¹⁰ *Pertama*, Sekolah Terpadu (memadukan sekolah dengan pesantren), *kedua*, Sekolah Pesantren (memadukan pesantren dengan sekolah). Kategori pertama ini maksudnya adalah sekolah tersebut terlebih dahulu berdiri yang kemudian membentuk sebuah asrama dengan proses pembelajaran terjadi penambahan sebagaimana sistem pendidikan sebuah pesantren. Sedangkan kategori kedua pesantrenlah yang didalamnya telah menanamkan tradisi kepesantrenan yang kemudian memasukkan sistem sekolah dalam pembelajarannya.

Muhammadiyah Boarding School merupakan salah satu jenis pondok pesantren kategori modern, menjadi contoh pada model pendidikan yang kedua tersebut. Sebagaimana namanya, lembaga pendidikan pesantren ini berada dalam naungan persyarikatan Muhammadiyah. Model pondok pesantren ini pertama kali berdiri dan diperkenalkan pada masyarakat di di Desa Bokoharjo, Prambanan, yang dipelopori para pemuda Muhammadiyah. Lembaga pendidikan yang awalnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini, kemudian dikembangkan menjadi pondok pesantren dengan sebutan Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta.

Seiring dengan berjalannya waktu, dengan semakin berkembangnya MBS Yogyakarta, daerah-daerah lain turut mengembangkan dan mendirikan model pesantren modern ini, diantara contohnya adalah MBS Jetis, yang terdapat di Kabupaten Ponorogo dan MBS Trenggalek, sebelah timur alun-

¹⁰ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum PAI Islam Di Sekolah, Madarasah, Dan Perguruan Tinggi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) 54.

alun Trenggalek. Sebagaimana observasi awal yang dilakukan peneliti di lapangan menunjukkan kedua lembaga pesantren tersebut menerapkan sistem pendidikan pondok pesantren modern, dimana kedua lembaga tersebut memadukan kurikulum sekolah kedalam kurikulum pesantren. Kedua lembaga pesantren tersebut melakukan pembelajaran pesantren pada siang hari sampai malam sedangkan pendidikan umum dilakukan pada pagi hari sampai siang. Dengan berbekal tradisi keilmuan pesantren dan keilmuan umum maka *output* yang dihasilkan lembaga pendidikan dirasa telah mencukupi dalam menghadapi era Industri yang semakin maju.¹¹

Pendidikan pondok pesantren merupakan topik yang menarik untuk dikaji. Berdasarkan latar belakang dalam bahasan sebelumnya, peneliti menjadi tertarik untuk mengkaji dan mempelajari model penataan sistem pendidikan di MBS Jetis, Ponorogo dan MBS Trenggalek, karena dapat pastikan bahwa pesantren dan non pesantren memiliki titik tekanan belajar yang berbeda. Jelas bahwa pesantren akan terus menekankan unsur moral dan nilai-nilai agama yang selama ini mendominasi dalam proses pendidikan. Kehadiran wacana kurikulum dan masalah kaderisasi menjadi variabel signifikan dalam penelitian ini. Sebab, menurut para ahli, proses pendidikan “sekolah” di pondok pesantren sangat layak dilakukan, mengingat santri-santrinya sudah berkompeten dalam ilmu agama dan tumbuhnya kajian keilmuan yang luas.

¹¹ Saiful Anwar, “*Observasi Awal Lokasi I Dan Lokasi II, September 2021,*” 2021.

B. Rumusan Masalah

Peneliti dalam penelitian ini ingin menjabarkan hal-hal yang berkaitan dengan kurikulum pesantren dalam kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah di MBS Jetis Ponorogo dan MBS Trenggalek, dan rumusan masalah mengenai fokus yakni:

1. Bagaimana perencanaan kurikulum pesantren dalam kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah di MBS Ponorogo dan MBS Trenggalek?
2. Bagaimana implementasi kurikulum pesantren dalam kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah di MBS Ponorogo dan MBS Trenggalek?
3. Bagaimana evaluasi kurikulum pesantren dalam kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah di MBS Ponorogo dan MBS Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan di atas maka tujuan penelitian yang dilakukan mengenai fokus sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan perencanaan kurikulum pesantren dalam kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah di MBS Ponorogo dan MBS Trenggalek
2. Mendiskripsikan implementasi kurikulum pesantren dalam kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah di MBS Ponorogo dan MBS Trenggalek
3. Mendiskripsikan evaluasi kurikulum pesantren dalam kaderisasi persyarikatan Muhammadiyah di MBS Ponorogo dan MBS Trenggalek

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini memuat kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis

Sebagai penelitian lapangan diharapkan hasil temuan dan pembahasan dapat menjadi bahan rujukan, teori keterbaruan pada penelitian berikutnya yang relevan, dan menambah keilmuan khususnya bagi peneliti, pelajar dan masyarakat pada umumnya.

2. Secara praktis

Bagi dunia pendidikan: Produk penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan utama didunia pendidikan khususnya pada penelitian mengenai kurikulum pesantren.

Bagi masyarakat: Hasil kajian diharapkan mampu memberikan informasi secara nyata akan sistem pendidikan pesantren khususnya dalam mempersiapkan kader-kader penerus.

Bagi peneliti: Paparan studi kasus ini peneliti berharap mendapatkan keilmuan, ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga dapat diaplikasikan dalam keseharian serta mampu menjadi bagian dari banyak contoh peneliti-peneliti akan pentingnya pendidikan pesantren.